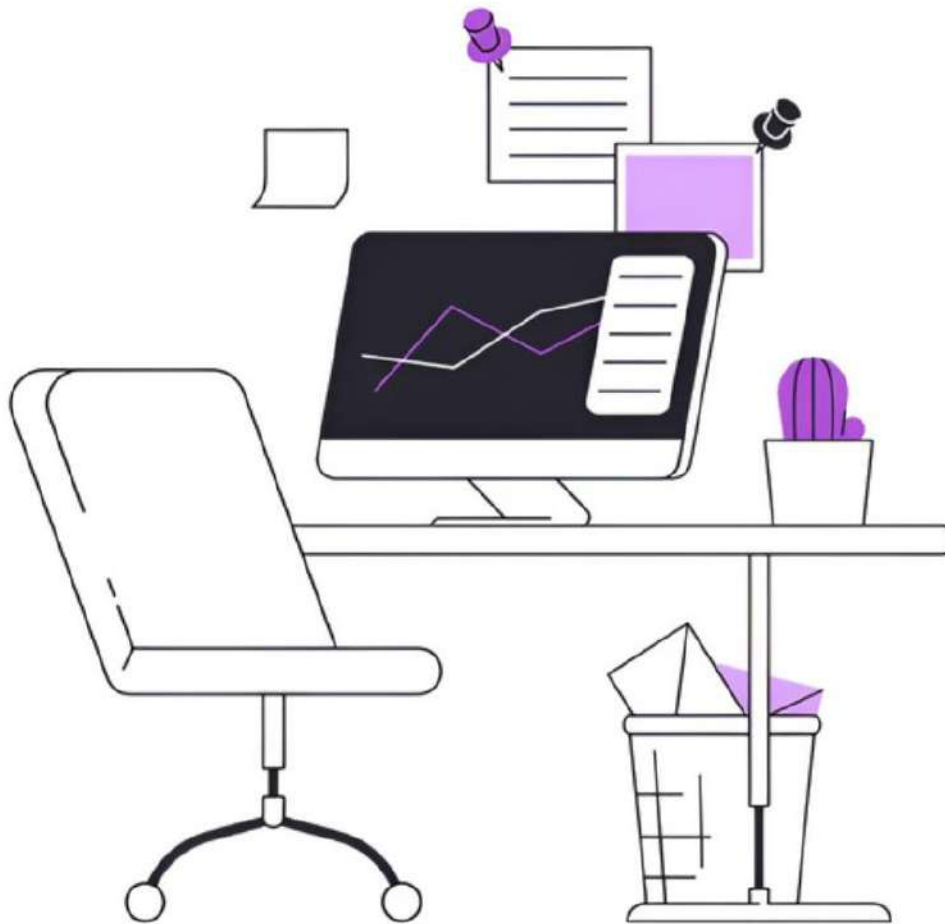




Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya



RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 ini dapat tersusun. Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2024 Dinas Sosial, Renja Perubahan tahun 2024 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dan juga di dasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari Dinas. Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun tersebut, mengetahui capaian kinerja tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV, dan bisa melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan, perubahan SOTK dan kebijakan dari pemerintah pusat. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini. Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik.

Sungai Raya, Juni 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**

Wasilun, S.Ag.,M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196708081999031010

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Capaian Renstra Dinas Sosial	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	63
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	63
3.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	88
BAB V PENUTUP	93



Daftar Tabel

TABEL 2. 1	10
TABEL 2. 2	29
TABEL 2. 3	39
TABEL 2. 4	43
TABEL 3. 1	68
TABEL 4. 1	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah merupakan tahapan awal dalam perencanaan penganggaran. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra SKPD, Hasil evaluasi Renja Tahun lalu dan Hasil evaluasi Renja tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan.

Renja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang mengusung tema “Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya”. Tema tersebut memiliki kata kunci penguatan SDM unggul dan pemulihan sosial ekonomi.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perubahan perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode satu tahun berjalan. Rencana Kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu perangkat daerah . Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
 25. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 61)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial adalah untuk menjadi pedoman terhadap perubahan indikator, target dan sasaran program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2024 adalah untuk memperjelas arah kebijakan dan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
3. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
4. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5. BAB V Penutup

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Capaian Renstra Dinas Sosial**

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mendapat alokasi dana Rp. 4.605.332.286,- Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu Rp 4.070.249.743,-

Dibagi dalam beberapa kegiatan/sub kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu Rp 47.058.974,- dibagi kedalam 3 sub kegiatan yaitu
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Rp 24.770.308,-
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Rp 23.631.950,- terealisasi sebesar Rp 6.938.010,-
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp 15.350.656,-
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu Rp 3.098.015.734,- di bagi kedalam 4 Sub Kegiatan yaitu
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu Rp 2.995.961.809, terealisasi sebesar Rp 3.066.047.843,-
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan Pagu Rp 23.170.670,-



- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan Pagu 5.016.784,00,-
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dengan Pagu 7.289.844,- terealisasi sebesar Rp 3.780.437,-
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Pagu Rp 9.061.509,- dibagi kedalam 3 Sub Kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Rp 5.642.626,- terealisasi sebesar Rp 3.043.928,-
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Rp 3.019.948,-
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Pagu Rp 2.997.633,-
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Pagu Rp 129.352.188,- dibagi dalam 5 Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Pagu Rp 3.073.990,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Pagu Rp 44.362.710,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Pagu Rp 5.265.488,-
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu Rp 43.650.000,-
 - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan Pagu Rp 33.000.000,-
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Pagu Rp 198.150.000,- dibagi kedalam Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu Rp 198.150.000,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Rp 484.128.838,- dibagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu Rp 41.904.000,-



- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Pagu Rp 442.224.838,-
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Rp 104.482.500,- dibagi kedalam 5 Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Pagu Rp 29.062.500,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu Rp 50.000.000,-
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu Rp 7.300.000,-
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud dengan Rp 10.800.000,- terealisasi 100%
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu Rp 7.320.000
- 2. Program Pemberdayaan Sosial dengan total Pagu Rp 12.538.113,-
Dibagi dalam beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan :
 - Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp 12.538.113,- dibagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp 5.591.883,-
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp 6.946.230,-
- 3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan Pagu Rp 730.014,-
- 4. Program Rehabilitasi Sosial dengan Pagu Rp 303.047.250,-
Dibagi kedalam beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan :
 - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan Pagu Rp 286.684.785,- dibagi kedalam 3 Sub Kegiatan :



- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan Pagu Rp 12.171.999,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Rp 54.081.212,-
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Rp 220.431.574,-
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan Pagu Rp 16.362.465,- dibagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu :
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dengan Pagu Rp 13.962.465,-
 - Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan Pagu Rp 2.400.000,-
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dengan Pagu Rp 158.864.448,- dengan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Dibagi ke dalam 3 Sub Kegiatan :
- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp 15.666.096,-
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp 25.748.352,-
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan Pagu Rp 117.450.000,-
6. Program Penanganan Bencana dengan Pagu Rp 59.902.718,-
- Dibagi kedalam beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan :
- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota jumlah Pagu Rp 43.426.859,- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan Jumlah Pagu Rp 16.475.859,- dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana terealisasi sebesar Rp 16.475.859,-



TABEL 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya s/d Tahun 2024**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 0 0 6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
1 0 0 0 6 2 2 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kegiatan	2	2	2	100	100	2	6	300%



1	0 0 2 0 00 6 2 3 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	20	20	20	100	20	60	150%
1	0 0 2 0 00 6 2 3 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasistasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembag a	69	21	23	23	100	21	65	94%
1	0 0 6 3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persent ase	100	-	12	12	100	100	33.33333 333	33%
1	0 0 2 0 6 3 1	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	25	-	12	12	100	13	13	52%



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	-	12	12	12	13	13	52%
1	0	0				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase	100	79.5	100	90.8	90.8	100	90.1	90%
1	0	0	2	0		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase	100	116	100	81.6	81.6	100	99.2	99%



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120		60	59	98.33	60	119	99%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			-		-			
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	240		120	121	108	120	241	100%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			-	-	-	-		



1	0	0	2	0	00	6	4	1	05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500	290	250	112	44.8	250	652	130%
1	0	0	2	0	00	6	4	1	06	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	2	0	00	6	4	1	07	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	2	0	00	6	4	1	08	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-



1	0	0	2	0	00	6	4	1	10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-			
1	0	0	2	0	00	6	4	1	11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-			
1	0	0	2	0	00	6	4	1	12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-			
1	0	0	2	0		6	4	2	2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase	100	43.33	100	100	100	100	81.11	81%



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kabupaten/Kota	Orang	600	130	300	359	100	300	789	132%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota	Orang	200000	-	200000	200000	100	-	200000	100%
1	0	0				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penanganan Fakir Miskin	Persentase	100	246.65	-	-	-	100	115.55	116%
1	0	0	2	0		Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar				-	-	-	-	-		
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	Orang			-	-	-	-		



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	Orang		-	-	-	-	-		
1	0	0	2	0	02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	Orang	62000	161006	-	-	10000	171006	276%	
1	0	0	2	0	01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	62000	161006	-	-	10000	171006	276%	
1	0	0	2	0	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	38000	188810	-	-	21000	209810	552%	



1	06	05	2	02	0003	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	20000	-	-	20000	20000	100%		
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase	100	236	100	100	100	145.3333333	145%	
1	06	06	2	01		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	Orang	412	483	204	644	100	208	1335	324%
1	06	06	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	412	483	204	644	100	208	1335	324%



1	06	06	2	02		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kali	4	2	2	2	100	2	6	150%
1	06	06	2	02	0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	104	52	51	51	100	52	155	149%
1	06					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100		100		100	93.59	31.1961111	31%
1	06	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100%
1	06	01	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5	5	5	100	6	16	160%



1	0612010002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	-	-	-	-									
1	0612010003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen			-	-	-								
1	0612010004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	Dokumen			-	-	-								
1	0612010005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen			-	-	-								



1	06	01	2	01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	1	1	1	100	5	7	350%
1	06	01	2	01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	4	4	4	100	1	9	113%
1	06	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100%
1	06	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	44	14	23	23	100	23	60	136%
1	06	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24		12	12	100	1312	1324	5517 %



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	1	1	1	100	1	3	150%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	12	12	12	100	17	41	171%
1	0	0	2	0	03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	persentase	100		100	100	100	100	66.66666667	67%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2		1	1	100	2	3	150%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2		1	1	100	1	2	100%



1	0612030005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan													
1	0612030006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2			1	1	100	5	6	300%				
1	061205	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrai Kepegawaian	Dokumen	100			-	-	-	-		0%				
1	06120502	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		1		-		-	1	2	100%				
1	0612050003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrai Kepegawaian	Dokumen				-		-		0					
1	0612050011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12			-		-	5	5	42%				



1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	92.57	92.57	100	97.5233333	98%
1	0	0	2	0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	12	1	1	100	1	14	200%
1	0	0	2	0	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah AC	Unit		14	-	-		1	15	100%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	7	3	4	4	100	17	24	343%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	7	3	3	3	100	5	11	157%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	12	12	12	100	365	389	1621 %
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	566	12	283	178	62.89	250	440	78%



1	0612	0610	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen				-		-		0	#DIV/0!
1	0612	0611	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	14			-		-	14	14	100%
1	0612	0617	0017	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	111	25	8	8	100	27	60	54%	
1	0612	0617	0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	6	-	-	-	-	-	-	-	
1	0612	0617	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	0612	0617	0005	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	103	16	-	-	-	20	36	35%	
1	0612	0617	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	4	9	5	5	100	4	18	450%	



1	06120700	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	12	3	3	100	3	18	600%
1	061208		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase	100	100	100	100	100	42	242	242%
1	06120800	02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	12	12	12	100	24	48	200%
1	06120800	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	12	12	12	100	18	42	175%
1	061209		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	126		39	24	61.53		24	19%



1	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	12	7	7	100	1	20	143%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2		1	1	100	7	8	400%
1	0	0	2	0	00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Pelihara	Unit	103					-		
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	9	14	6	42.85	5	20	143%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1		1	1	100	1	2	200%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	Unit	1	8	16	9	56.25	16	33	3300 %



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase capaian program prioritas Kabupaten Kubu Raya. Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Kubu Raya Dalam Angka, Profil Daerah, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja SKPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi-misi Kabupaten Kubu Raya.
- 2) Persentase kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD terhadap dokumen perencanaan SKPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan SKPD; dan Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup sosial budaya terhadap dokumen perencanaan SKPD Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya seperti pada table 2.2 berikut ini:



TABEL 2. 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang dimiliki	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	532	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Data Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	



2	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	59	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%
3	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang dijangkau	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	532	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%
4	Jumlah kendaraan roda empat yang diakses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	3	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%



5	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang menerima paket pemakanan sesuai standar gizi	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	85	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%
	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%
	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	59	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%



	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	262	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Alat Bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Paket Perbekalan kesehatan yang tersedia	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	



	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan Kesehatan	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Tenaga kesehatan yang disediakan dirumah singgah	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Pekerja sosial/TKSK/dan atau Relawan Sosial yang disediakan	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	59	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	



	<p>Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standard dikeluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial</p>	<p>Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota</p>	<p>515</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>75.70%</p>	<p>100%</p>	<p>80%</p>	<p>85%</p>	
	<p>Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat</p>	<p>Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota</p>	<p>515</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>75.70%</p>	<p>100%</p>	<p>80%</p>	<p>85%</p>	



	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	1	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	26	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	92	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	



	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	66	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang dirujuk	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	26	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan makanan	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	644	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	80%	85%	



Jumlah Korban Bencana yang menerima paket sandang	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	644	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	80%	85%
Jumlah Tempat Tinggal penampungan pengungsi yang dimiliki	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	80%	85%
Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	80%	85%
Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	80%	85%



	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang tersedia	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	59	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	80%	85%	
--	---	--	----	------	------	------	------	---------	------	-----	-----	--



TABEL 2. 2.2

Pencapaian Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan	Nilai SAKIP	B 75	A 80	B 75	B 75	B 71.5	A 80	B 75	B 75
2	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Reformasi Birokra Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	90%	100%	90%	95%	99%	100%	90%	95%



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Ketercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan penanganan PPKS di Kabupaten Kubu Raya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam menyelenggarakan penanganan PPKS, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan proses perencanaan, antara lain:

1. Masih Tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain.
4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
9. Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan.

Untuk mengoptimalkan capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya akan menempuh cara-cara sebagai berikut:



- 1) Peningkatan sistem penyediaan akses kebutuhan dasar bagi PPKS.
- 2) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan pelayanan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 3) Optimalisasi anggaran pembiayaan dalam mendukung pencapaian pelayanan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 4) Optimalisasi sumber daya manusia aparatur bidang pelayanan sosial.

Selain permasalahan dan pemecahan permasalahannya, faktor-faktor yang berjalan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya antara lain:

- 1) Memiliki rencana strategis sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- 2) Memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Sosial mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan terutama untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya yaitu menjadikan Kabupaten Kubu Raya terdepan dan berkualitas.
- 4) Tersedianya dana untuk menunjang program dan kegiatan.

Sementara faktor-faktor di Dinas Sosial yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan tetapi tidak dimiliki oleh Dinas Sosial adalah:

- 1) Belum optimalnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia, terutama untuk tenaga teknis bidang sosial, pelatih dan tenaga teknis lainnya.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) Belum optimalnya perencanaan anggaran.
- 4) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan dan belum optimalnya koordinasi antara bidang yang ada.



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Pembangunan Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di pusat kota kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi sosial ekonomi politik di Kabupaten Kubu Raya akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Kubu Raya.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kabupaten Kubu Raya membutuhkan sinergisitas antara semua SKPD yang ada. Konsep sinergisitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Dinas Sosial dirasa masih belum bisa mengakomodir semua kegiatan.

TABEL 2. 3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Kubu Raya

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target		Kebutuhan Dana (Rp.)
			Indikator	Satuan					Indikator	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1002000000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	KKR	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase	100	Rp 12.538.113	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	KKR	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase	100	Rp 12.538.113	
1002002003	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	KKR	Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kegiatan	2	Rp 12.538.113	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	KKR	Persentase PSKS yang meningkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan	Kegiatan	2	Rp 12.538.113	



						Kabupaten /Kota						Kabupaten /Kota	kesejahteraan sosial				
1	0	0	2	0	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	KKR	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 5.591.883	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 5.591.883	
1	0	0	2	0	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	KKR	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	10	Rp 6.946.230	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	10	Rp 6.946.230	



1	0	0				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	KKR	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persentase	100	Rp 730.014	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	KKR	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persentase	100	Rp 730.014
1	0	0	2	0	1	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal	KKR	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	13	Rp 730.014	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal	KKR	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	2	Rp 730.014



1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	KKR	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13	Rp 730.014	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	KKR	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2	Rp 730.014
1	0	0	4							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	KKR	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase	100	Rp 121.610.272	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	KKR	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase	100	Rp 321.343.349



1	0	0	2	0		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	KKR	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase	100	Rp 106.544.981	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	KKR	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase	100	Rp 304.980.884
1	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	Rp 12.171.999	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	Rp 12.171.999



1	0	0	2	0	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	38	Rp 55.370.022	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	Rp 72.377.311
1	0	0	2	0	0	0	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	KK R	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	Rp 39.002.960	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	KK R	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 220.431.574
1	0	0	2	0	0	2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar	KK R	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase	100	Rp 15.065.291	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar	KK R	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase	100	Rp 16.362.465



						Panti Sosial						Panti Sosial					
1	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	KKR	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 15.065.291	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	KKR	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 13.962.465
1	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	Orang	0	Rp -	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	Orang	0	Rp 2.400.000



								Kabupaten/Kota										Kabupaten/Kota						
1	0	0						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KKR	Persentase Penanganan Fakir Miskin	Persentase	100	Rp 370.649.578	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KKR	Persentase Penanganan Fakir Miskin	Persentase	100	Rp 158.864.448					
1	0	0	2	0	2			Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	KKR	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	Orang	59000	Rp 370.649.578	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	KKR	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	Orang	59000	Rp 158.864.448					
1	0	0	2	0	0	1		Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	KKR	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	26000	Rp 34.499.376	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	KKR	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	26000	Rp 15.666.096					



1	0	0	2	0	0	0	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	KK R	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	19 00 00	Rp 32.924.352	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	KK R	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	19 00 00	Rp 25.748.352
1	0	0	2	0	0	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	KK R	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	43 00 0	Rp 303.225.850	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	KK R	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	0	Rp 117.450.000
1	0	0					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	KK R	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase	10 0	Rp 41.896.164	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	KK R	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase	10 0	Rp 59.902.718



1	0	0	2	0		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	KK R	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	Orang	208	Rp 24.001.649	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	KK R	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	Orang	40	Rp 43.426.859
1	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	208	Rp 24.001.649	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	Rp 43.426.859
1	0	0	2	0		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota	KK R	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kali	2	Rp 17.894.515	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota	KK R	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kali	2	Rp 16.475.859



1	0	0	2	0	0	0	0	2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	KKR	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 17.894.515	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	KKR	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 16.475.859
1	0	6							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KKR	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	71,5	Rp 4.132.414.448	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KKR	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	71,5	Rp4.005.957.697
1	0	0	2	0	1				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	Rp 51.066.227	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	Rp 47.058.974
1	0	0	2	0	1	0	0	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	KKR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	Rp 28.777.561	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	KKR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	Rp 24.770.308



						Perangkat Daerah						Perangkat Daerah					
1	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	Rp 6.938.010	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	Rp 6.938.010
1	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp 15.350.656	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp 15.350.656
1	0	0	2	0	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	Rp 3.115.118.138	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	Rp 3.012.709.688



1	0	0	2	0	0	0	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	KKR	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Rp 3.019.948	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	KKR	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	Rp 3.019.948
1	0	0	2	0	0	0	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKR	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	Rp 2.997.633	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKR	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	Rp 2.997.633
1	0	0	2	0	0	6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	Rp 171.007.236	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	Rp 129.352.188
1	0	0	2	0	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	KKR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 3.073.990	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	KKR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 3.073.990
1	0	0	2	0	0	4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	17	Rp 63.400.846	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	17	Rp 44.362.710



1	0	0	2	0	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KKR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5	Rp 15.082.400	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KKR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5	Rp 6.345.488
1	0	0	2	0	0	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	283	Rp 53.450.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	Rp 57.384.000
1	0	0	2	0	0	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	14	Rp 36.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	Rp 36.000.000
1	0	0	2	0	7		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	KKR	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	3	Rp 198.150.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	KKR	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	3	Rp 198.150.000



						Pemerintah Daerah						Pemerintah Daerah					
1	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KK R	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	Rp 198.150.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KK R	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	Rp 198.150.000
1	0	0	2	0	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KK R	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	26	Rp 483.528.838	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KK R	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	26	Rp 487.328.838
1	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KK R	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Rp 41.904.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KK R	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Rp 41.904.000



1	0	0	2	0	0	0	0	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KK R	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14	Rp 441.624.838	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KK R	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14	Rp 445.424.838
1	0	0	2	0	0	0	0	0	9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KK R	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	40	Rp 104.482.500	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KK R	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	25	Rp 104.482.500
1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KK R	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	Rp 29.062.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KK R	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	Rp 29.062.500



1	0	0	2	0	0	0	0	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	Rp 50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	Rp 50.000.000
1	0	0	2	0	0	0	0	6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	KKR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	Rp 7.300.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	KKR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	Rp 7.300.000
1	0	0	2	0	0	0	0	8	Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	KKR	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	Rp 10.800.000	Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	KKR	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	Rp 10.800.000



1	0	0	2	0	0	0	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KK R	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	12	Rp 7.320.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KK R	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	12	Rp 7.320.000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	------	--	------	----	--------------	--	------	--	------	----	--------------



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kubu Raya, Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya ialah meningkatkan kualitas hidup para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya transparansi akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas dan Keuangan	Nilai SAKIP	B (75)
2	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	100%

3.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD



- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

2.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

3.1 Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

4.1 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

4.2 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

5.1 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota



- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- 6.1 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
- 6.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana



TABEL 3. 2

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2024 DAN PERLIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN KUBU RAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Perubahan Tahun 2024				Cata tan Penti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Indikator	Satuan	Lok asi	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 0 6 0 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen tase	KKR	100	Rp 12.538.113	APB D		100	Rp 60.000.000
1 0 6 2 0 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kegiata n	KKR	2	Rp 12.538.113	APB D		2	Rp 60.000.000



1	0	0	2	0	00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	10	Rp 5.591.883	APB D	10	Rp 30.000.000
1	0	0	2	0	00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lemba ga	KKR	10	Rp 6.946.230	APB D	10	Rp 30.000.000
1	0	0	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persen tase	KKR	100	Rp 730.014	APB D	100	Rp 5.028.100
1	0	0	2	0	01	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	KKR	13	Rp 730.014	APB D	2	Rp 5.028.100



						Desa/Kelurahan asal									
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	13	Rp 730.014	APB D		2	Rp 5.018.100
1	0	0				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase	KKR	100	Rp 321.343.349	APB D		100	Rp 339.972.01 2



1	0	0	2	0		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase	KKR	100	Rp 304.980.884	APB D		100	Rp 316.591.322
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	30	Rp 12.171.999	APB D		5	Rp 51.546.242
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	0	Rp -	APB D		33	Rp 18.163.950



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	38	Rp 72.377.311	APB D		33	Rp 149.928.678
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	0	Rp -	APB D		10	Rp 8.522.550
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	150	Rp 220.431.574	APB D		100	Rp 51.987.536
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	0	Rp -	APB D		50	Rp 3.507.060



						Pengemis dan Masyarakat									
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	KKR	0	Rp -	APB D		10	Rp 646.550
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	0	Rp -	APB D		10	Rp 848.750
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	0	Rp -	APB D		10	Rp 21.697.199



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kabupaten/Kota	Orang	KKR	0	Rp -	APB D	10	Rp 8.536.842
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	0	Rp -	APB D	10	Rp 1.205.965
1	0	0	2	0		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase	KKR	100	Rp 16.362.465	APB D	100	Rp 23.380.690



1	0	0	2	0	00	08	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kabupaten/Kota	Orang	KKR	50	Rp 13.962.465	APB D	50	Rp 20.380.690
1	0	0	2	0	00	10	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota	Orang	KKR	0	Rp 2.400.000	APB D	50	Rp 3.000.000
1	0	0					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase	KKR	100	Rp 158.864.448	APB D	100	Rp 493.966.759
1	0	0	2	0			Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar	Persentase Anak-Anak Terlantar yang Dirujuk	Persentase	KKR	0	Rp -	APB D	100	Rp 20.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Rujukan anak anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	Orang	KKR	0	Rp -	APB D	100	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	Orang	KKR	0	Rp -	APB D	100	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	Orang	KKR	5900 0	Rp 158.864.448	APB D	1000 0	Rp 473.966.75 9
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	KKR	2600 0	Rp 15.666.096	APB D	1000 0	Rp 50.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	KKR	1900 00	Rp 25.748.352	APB D	2100 0	Rp 50.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	KKR	43000	Rp 117.450.000	APB D		20000	Rp 373.966.759
1	0	0				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase	KKR	100	Rp 59.902.718	APB D		100	Rp 99.999.484
1	0	0	2	0		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	Orang	KKR	208	Rp 43.426.859	APB D		204	Rp 47.635.898
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	208	Rp 43.426.859	APB D		204	Rp 47.635.898



1	0	0	2	0		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kali	KKR	2	Rp 16.475.859	APB D		2	Rp 52.363.586
1	0	0	2	0	00 02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kabupaten/Kota	Orang	KKR	50	Rp 16.475.859	APB D		52	Rp 52.363.586
1	0					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	KKR	71,5	Rp4.005.957.6 97	APB D		71,5	Rp4.729.30 6480
1	0	0	2	0		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen tase	KKR	100	Rp 47.058.974	APB D		13	Rp 210.000.40 4
1	0	0	2	0	00 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	KKR	6	Rp 24.770.308	APB D		3	Rp 30.000.404



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	KKR	0	Rp -	APB D	1	Rp 30.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	KKR	0	Rp -	APB D	1	Rp 30.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	Dokumen	KKR	0	Rp -	APB D	1	Rp 30.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	KKR	0	Rp -	APB D	1	Rp 30.000.000



1	06	01	2	01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	KKR	5	Rp 6.938.010	APBD	5	Rp 30.000.000
1	06	01	2	01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	KKR	1	Rp 15.350.656	APBD	1	Rp 30.000.000
1	06	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	KKR	100	Rp3.012.709.688	APBD	43	Rp3.050.000.000
1	06	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	KKR	21	Rp 2.980.741.796,64	APBD	23	Rp3.000.000.000
1	06	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	KKR	1312	Rp 23.170.670	APBD	1312	Rp 30.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	KKR	1	Rp 5.016.784	APB D	1	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	KKR	17	Rp 3.780.437	APB D	17	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0	03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	KKR	100	Rp 9.061.509	APB D	8	Rp 15.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	KKR	2	Rp 3.043.928	APB D	2	Rp 5.000.000



1	0	0	2	0	00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	KKR	1	Rp 3.019.948	APB D		1	Rp 5.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	KKR	5	Rp 2.997.633	APB D		5	Rp 5.000.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	KKR	0	Rp -	APB D		5	Rp 81.119.850
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	KKR	0	Rp -	APB D		1	Rp 28.334.850
1	0	0	2	0	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	KKR	0	Rp -	APB D		7	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	KKR	0	Rp -	APB D		5	Rp 42.785.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	KKR	100	Rp 129.352.188	APB D		27	Rp 375.380.000



1	0	0	2	0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	KKR	1	Rp 3.073.990	APB D	1	Rp 6.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	KKR	17	Rp 44.362.710	APB D	17	Rp 90.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	KKR	5	Rp 6.345.488	APB D	5	Rp 30.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokum en	KKR	0	Rp -	APB D	365	Rp 4.380.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	KKR	250	Rp 43.650.000	APB D	250	Rp 200.000.00 0
1	0	0	2	0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	KKR	0	Rp -	APB D	300	Rp 5.000.000



1	0	0	2	0	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	KKR	14	Rp 36.000.000	APB D		14	Rp 40.000.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	KKR	55	Rp 198.150.000	APB D		55	Rp 324.393.726
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	KKR	0	Rp -	APB D		6	0
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	KKR	0	Rp -	APB D		12	Rp 63.936.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	KKR	0	Rp -	APB D		34	Rp 62.307.726



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	KKR	3	Rp 198.150.000	APB D		3	Rp 198.150.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	KKR	26	Rp 518.528.838	APB D		37	Rp 540.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	KKR	12	Rp 41.904.000	APB D		24	Rp 60.000.000
1	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	KKR	14	Rp 476.624.838	APB D		13	Rp 480.000.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	KKR	40	Rp 104.482.500	APB D		43	Rp 133.412.500



1	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	KKR	1	Rp 29.062.500	APB D		1	Rp 29.062.500
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	KKR	1	Rp 50.000.000	APB D		14	Rp 75.000.000
1	0	0	2	0	00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Pelihara	Unit	KKR	0	Rp -	APB D		12	Rp 5.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	KKR	10	Rp 7.300.000	APB D		15	Rp 9.950.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	KKR	1	Rp 10.800.000	APB D		1 Unit	Rp 14.400.000



1	0	0	2	0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	KKR	12	Rp 7.320.000	APB D		1 Unit	0
---	---	---	---	---	----	--	--	------	-----	----	-----------------	----------	--	-----------	---



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

TABEL 4. 1

ALOKASI ANGGARAN DINAS SOSIAL TAHUN 2024

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
-1						-2	-3
1	06					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.005.957.697
1	06	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp47.058.974
1	06	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp24.770.308
1	06	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp6.938.010
1	06	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp15.350.656
1	06	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.012.709.688
1	06	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.980.741.797
1	06	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp23.170.670
1	06	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp5.016.784



1	06	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp3.780.437
1	06	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp9.061.509
1	06	01	2	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp3.043.928
1	06	01	2	03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp3.019.948
1	06	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp2.997.633
1	06	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp147.166.188
1	06	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3.073.990
1	06	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp44.362.710
1	06	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp6.345.488
1	06	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp43.650.000
1	06	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp36.000.000
1	06	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp198.150.000
1	06	01	2	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp198.150.000
1	06	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp487.328.838
1	06	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp41.904.000
1	06	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp445.424.838
1	06	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp104.482.500



1	06	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp29.062.500
1	06	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp50.000.000
1	06	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp7.300.000
1	06	01	2	09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp10.800.000
1	06	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp7.320.000
1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp12.538.113
1	06	02	2	03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp12.538.113
1	06	02	2	03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp5.591.883
1	06	02	2	03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp6.946.230
1	06	03				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp730.014
1	06	03	2	01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp730.014



1	06	03	2	01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp730.014
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp562.697.186
1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp304.980.884
1	06	04	2	01	0001	Penyediaan Permakanan	Rp12.171.999
1	06	04	2	01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Rp72.377.311
1	06	04	2	01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp220.431.574
1	06	04	2	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp16.362.465
1	06	04	2	02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp13.962.465
1	06	04	2	02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp2.400.000
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp158.864.448
1	06	05	2	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp158.864.448
1	06	05	2	02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp15.666.096
1	06	05	2	02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp25.748.352
1	06	05	2	02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp117.450.000



1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp59.902.718
1	06	06	2	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp43.426.859
1	06	06	2	01	0001	Penyediaan Makanan	Rp43.426.859
1	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp16.475.859
1	06	06	2	02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp16.475.859

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2024. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kubu Raya

Substansi Renja Dinas Sosial disusun dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu di perhatikan, anantara lain :

1. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Dinas Sosial pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik dengan prinsip *Service Excellent*, yaitu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Alokasi APBD Kabupaten Kubu Raya untuk Dinas Sosial selama ini dirasa belum dapat menyentuh semua kebutuhan masyarakat, hal ini di karenakan luasnya wilayah Kabupaten Kubu Raya.
3. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.
4. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Dinas Sosial, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.



Kami berharap, bahwa Rencanan Kerja Dinas Sosial ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan Sosial dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian dokumen Rencanan Kerja Dinas Sosial ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**

Wasilun, S.Ag.,M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP.196708081999031010